

A. Judul Skripsi

PEMBERITAAN 100 HARI KINERJA KABINET INDONESIA BERSATU
KEDUA

B. Sub Judul

Analisis Media Performance Pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dalam Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia Periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010

C. Latar Belakang Masalah

Dinamika pro-kontra dalam pelaksanaan politik praktis memberikan beragam topik menarik bagi salah satu negara laboratorium demokrasi terbesar di dunia, Indonesia. Sebagai bagian dari proses demokrasi, muncul tanggapan pro-kontra atas kesuksesan presiden *incumbent* dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2009 lalu. Pesta demokrasi Indonesia itu sarat masalah (Djadjijono, 2008:297) namun langkah kerja pasangan yang menang mutlak dalam satu putaran ini tetap dinanti. Rakyat Indonesia menunggu kerja pemerintah mewujudkan janji-janji yang telah diberikan semasa kampanye.

Pada 17 Oktober 2009, Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia memberitakan salah satu langkah perdana pasangan SBY-Boediono ialah “mengauidisi” calon menteri yang akan dipercaya mendampingi kerja eksekutif, duduk di kabinet. Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, demikian SBY menegaskan nama kabinet yang dipimpinnya pada 2009 hingga 2014. Besar harapan, langkah kerja dewan menteri itu nantinya merupakan representasi kerja dan pencitraan kekuasaan eksekutif yang pro-rakyat selama lima tahun ke depan.

Beberapa catatan perbaikan sempat menjadi perhatian publik terkait keberadaan Kabinet Indonesia Bersatu periode sebelumnya. Sempat mengalami dua kali perombakan pada 5 Desember 2005 dan 7 Mei 2007 silam, ini menjadi bukti besarnya pengaruh partai politik terhadap presiden maupun akomodasi presiden terhadap partai politik kala itu (Yuda, 2010:135).

Merujuk Tjipta Lesmana, perombakan kabinet itu merupakan bentuk "*take-and-give in politics*", upaya SBY mengamankan kedudukan dan *bargaining power* di DPR (Lesmana, 2009:327). Dalam penjelasan politik praktis-nya, apabila partai berkuasa (*ruler party*) memiliki suara mayoritas di legislatif serta eksekutif berasal dari partai itu pula, maka usulan dan kebijakan eksekutif akan memperoleh dukungan dari legislatif.

Kemenangan SBY-Boediono dan Partai Demokrat (PD) pada pemilu 2009, meminjam pernyataan Anas Urbaningrum, merupakan "peristiwa politik yang sangat fenomenal" (Urbaningrum, 2010:2). Dalam pemilu legislatif 2009 partai yang didirikan pada tahun 2003 silam itu memperoleh 150 kursi. Itu bermakna sedikitnya 26,79% kursi di parlemen akan mendukung rancangan kebijakan yang diajukan eksekutif.

Karenanya, pengamat seperti Wiguna beranggapan kabinet SBY periode kedua seharusnya diisi lebih banyak orang profesional dan tidak terlalu diwarnai kompromi politik seperti periode sebelumnya (Wiguna, 2010:3). Memilih orang yang tepat pada tempatnya dan menduduki jabatan sesuai kemampuannya; *the right man on the right place*. Hal ini rasional, mengingat angka kemenangan

pilpres yang signifikan merupakan gambaran besar kepercayaan dan ekspektasi rakyat Indonesia pada presiden ke-6 RI ini.

Pada 21 Oktober 2009, di Istana Merdeka presiden mengumumkan secara resmi para menteri kabinetnya yang terdiri atas tiga menteri koordinator, menteri utama yang membawahi departemen, dan menteri negara. Nama-nama tersebut mengundang kritik karena didominasi orang-orang terdekat dan mitra koalisi Partai Demokrat (Wiguna, 2010:3). Harian Media Indonesia dalam “Presiden Tuntut Monoloyalitas”, 23 Oktober 2009, menyebutkan dari 34 nama yang diumumkan, 20 di antaranya berasal dari partai politik koalisi.

Menanggapi respon negatif yang muncul, SBY-Boediono beserta jajaran menterinya pun memberikan janji politik untuk menampilkan kinerja maksimal selama 100 hari awal masa kerja. Dalam situs resmi pemerintah Republik Indonesia dan Bappenas, agenda kerja 100 hari diklaim merupakan rangkaian awal dari pelaksanaan Prioritas Nasional Lima Tahun. Di dalamnya dicanangkan program *quickwins*, yakni program yang dirancang matang untuk rampung dalam seratus hari dan nyata nilai strategisnya.

Dalam situs itu pula, Kepala Bappenas menyatakan program-program itu menggambarkan problem pembangunan nasional, dari mulai soal terorisme, pertanahan, revitalisasi industri, pembangunan pertanian, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Hal itu menunjukkan pula usaha pemerintah untuk membangun kepercayaan (*trust building*) masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan hingga 2014.

Selama empat bulan, Oktober 2009 hingga Januari 2010, media cetak tanah air tidak lepas dari artikel opini maupun berita seputar langkah kerja yang dilaksanakan pemerintah. M Fadhil Hassan, ekonom senior, dalam tulisannya di Media Indonesia, 26 Oktober 2009, menyikapi program 100 hari menyampaikan “publik sangat berharap segera muncul percepatan penyelesaian berbagai masalah sosial, ekonomi, birokrasi, hukum, yang seolah semakin tidak jelas ujung dan pangkalnya”.

Mengutip Herbert J. Gans, McQuails mengungkapkan alasan media memprioritaskan isu berita (*story importance*) dapat dinilai dari empat dimensi yakni “*rank in government; impact on the nation and the national interest; impact on large number of people; significance for past and future*” (McQuails, 1995:217). Dimensi ini berlaku pula dalam pertimbangan pemberitaan kinerja kabinet.

Pada momen ini, peneliti menilai kinerja kabinet menjadi proses politik yang mendapatkan sorotan masyarakat dan menjadi sumber pemberitaan yang bernilai bagi media massa. Publik mempersepsikan bahwa 100 hari merupakan waktu yang tepat untuk mengukur kemampuan kerja kabinet baru tersebut. Kabinet Indonesia Bersatu Kedua harus langsung bekerja keras menjalankan program 100 hari yang disampaikannya.

Peneliti menilai pentingnya peran dan posisi pemerintah di mata rakyat, serta besarnya konsekuensi kebijakan yang diambil eksekutif terhadap publik menjadikan isu ini mendapat ruang tersendiri dalam pemberitaan. Kepentingan media sendiri untuk menjual informasi (industri media) ataupun mengawal

pemerintahan, serta kepentingan masyarakat sebagai konsumen atau publik dari media menjadi pertimbangan pemberitaan tersebut.

Pendapat yang menguatkan juga disampaikan Alexander dan Hanson, mengaitkan konsep *fourth estate* media cetak terhadap evaluasi atas pemerintahan yakni

The press is sometimes called the "fourth estate," a concept that envisions the press as the guardians of the public interest and watchdogs of the executive, legislative, and judicial activities of the state. (Alexander dan Hanson, 2009: 135)

Dari segi positif, peran media profesional yang diungkapkan Anas Urbaningrum tampak menarik. Politisi muda yang terpilih sebagai Ketua Umum PD 2010 itu yakin kritik-kritik yang dilontarkan oleh media massa dengan cerdas, tajam, dan konstruktif dapat memudahkan masyarakat untuk memahami kebijakan yang diambil pemerintah (Urbaningrum, 2010:19).

Dengan demikian, performa media dalam memberitakan sebuah fakta, misalkan akurasi pemberitaan serta kenetralan media menjadi pokok penting yang patut dipertimbangkan. Merujuk Tim Peneliti Dewan Pers, pers yang profesional, yakni "jujur, tidak memihak, objektif, akurat, tanpa prasangka, berimbang, memisahkan opini dan fakta, etis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia" merupakan harapan masyarakat (Rahayu.ed., 2006:3). Teoti Adhitama, anggota Dewan Redaksi Media *Group* bahkan menulis dengan tegas fungsi ideal media

Konsep mengenai peran orang media tidak mutlak sama, sekalipun kami menyadari tugas utama sama : memberikan gambaran tentang keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Prioritas adalah mengawal demokrasi supaya selamat ("Penjaringan Informasi" dalam *Media Indonesia*, 6 November 2009).

Di sisi lain, pers di Indonesia sejak lama dianggap menjadi "partisan parpol atau sedikitnya primordialisme agama" (Hamad, 2004:51). Mengutip Altschull, Severin dan Tankard menuliskan gagasan serupa bahwa dalam sistem pers mana pun, media memiliki kecenderungan berpihak mewakili otoritas kekuasaan sosial, ekonomi dan politik (Severin dan Tankard, 2005:384). Bahkan secara finansial, keberadaan pers nyata disokong oleh ragam iklan-iklan politik ("Koran Jadi Pilihan Favorit Pemasang Iklan" dalam *Media Indonesia*, 6 November 2009).

Kecenderungan ini merupakan ancaman bagi kinerja pers penyokong demokrasi, yakni di saat kinerja media menjadi buruk akibat informasi yang tidak memadai bahkan menyimpang dari fakta, karena pengaruh dan tekanan dari organisasi di dalam maupun luar keredaksian.

Bambang Harimukti, seorang jurnalis senior tanah air pun menjelaskan media massa sebagai kumpulan banyak organisasi dan manusia dengan beragam kepentingannya. Lebih lanjut ia menyatakan

Setiap media massa memiliki karakter dan latar belakang tersendiri, baik dalam isi dan pengemasan beritanya, maupun dalam tampilan serta tujuan dasarnya. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda dari masing-masing media massa. Baik yang bermotif politik, ekonomi, agama, dan sebagainya (dalam Septiawan, 2005:105).

Pertaruhan citra dari partai pemerintah serta latar belakang kedua harian nasional itu menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mengetahui *media performance* pada surat kabar nasional. Performa media (*media performance*) tersebut akan memberikan cerminan mengenai bagaimana kualitas profesionalisme masing-masing media untuk memberitakan berita politik tanah air, yakni 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Dalam pencitraan

politik, pujian dan imaji positif yang disajikan media akan meningkatkan kesan positif terhadap partai atau politisi. Sebaliknya, pemberitaan yang tidak netral dan bernada negatif dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat pada pemerintahan saat itu (Firmanzah, 2010:40).

Kualitas media sangat penting mengingat masyarakat umum (*subordinate class*) mengharapkan media massa sebagai alat kontrol sosial dan perubahan (Ardial, 2009:170). Hal tersebut dimaknai, media massa dalam fungsinya sebagai infrastruktur politik berperan sebagai media komunikasi politik (*media of political communication*) yang harus menjamin terwujudnya keberagaman opini dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik (Wahyuni, 2004:159).

Peran pemberitaan media terhadap 100 hari kinerja kabinet merupakan peran media komunikasi politik, dimana publik dapat mengetahui dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan (pemerintah) berdasarkan informasi yang mereka terima melalui media. Mengutip Murdock dan Golding, Ngurah menyatakan dengan adanya akses terhadap informasi, masyarakat dapat mengetahui hak-hak mereka di ruang lain dan memungkinkan mereka untuk mencapai hak ini secara efektif dengan melibatkan pilihan politis (Ngurah, 2004:141). Sumber informasi yang berkualitas merupakan pertimbangan rujukan yang rasional dan ideal bagi opini dan pilihan politis masyarakat.

Merujuk pada hasil riset Dewan Pers, bias berita merupakan tantangan bagi kualitas isi media, sebuah isu yang seharusnya mendapatkan perhatian ketika menyadari kepentingan publik dalam ruang industri media (Rahayu.ed., 2006:6). Hal senada disampaikan Burton mengenai bias berita, yakni berita dapat

cenderung pada satu pandangan atau interpretasi daripada pandangan/interpretasi lainnya (Burton, 2008:161). Mengutip Melvin Mencher, isu ini akan bermuara pada proses produksi berita karena menentukan kualitas berita (Rahayu.ed., 2006:7). Bagi Mencher, penting untuk mencermati pengumpulan (*news gathering*) dan penelitian berita (*news writing*), karena akan menentukan kualitas berita media. Selanjutnya, kualitas berita lah yang menunjukkan apakah performa sebuah media sudah dianggap baik.

Kerangka penelitian inilah yang menjadi rujukan dalam menyusun penelitian ini, yang juga didasarkan pada kerangka konseptual objektivitas pemberitaan Westerstahl (Rahayu.ed., 2006:8). Dengan menggunakan kriteria-kriteria yang peneliti anggap relevan dari riset Dewan Pers, analisis *media performance* ini merupakan penilaian atas kualitas media pilihan peneliti dalam memberitakan isu terkait.

Performa media yang dianggap baik dan ideal yang digagas dalam penelitian ini ialah yang bersikap tidak memihak dan menampilkan tingkat kualitas pemberitaan yang baik. Keberpihakan dalam bentuk bias berita jelas merupakan disorientasi terhadap fungsi media dalam komunikasi politik. Tanpa pemberitaan yang baik dan berimbang yang disampaikan media, publik tidak dapat mengetahui serta mengevaluasi dengan baik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dapat terjadi, masing-masing media pilihan peneliti akan memberitakan secara bias menonjolkan sikap partisan dengan latar belakang tertentu yang dimilikinya. Sebuah media, dapat memiliki relasi kepartaian dan memihak pada pandangan partai politik ataupun pemegang saham yang merupakan bagian

darinya. Namun, dapat terjadi pula, media justru bergeser dengan bersikap independen dan tidak memihak. Dengan demikian dapat direfleksikan ketika media memiliki relasi dengan dunia politik, akan bersikap memihak atau independen dalam memberitakan.

Terdapat dua media cetak nasional yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia. Kedua media tersebut merupakan bagian dari lima surat kabar nasional dengan tiras terbesar. Dalam hal ini, tema yang diangkat merupakan tema berita yang bersentuhan dengan minat (*interest*) pembaca di tingkat nasional. Dengan demikian, dibutuhkan pula media dengan tingkat sebaran nasional (*national coverage*) serta tiras nasional yang representatif. Selain itu, peneliti juga berasumsi adanya indikasi lingkungan ekonomi dan politik di sekitar kedua media yang berpengaruh pada performa media, dimana keduanya merupakan representasi media partisan dan media netral.

Koalisi yang ada pada pusat pemerintahan sekarang terbangun atas partai-partai besar dengan ideologi formal nasionalis-sekuler dan agama Islam yang kental. Denny J.A, direktur LSI, dalam bunga rampainya “Islam versus Nasionalis Sekuler” mengakui bahwa konstruksi politik Indonesia berdiri di bawah dua kaki, “kaki nasionalis” dan “kaki Islam” meski tidak secara kentara ditampilkan partai-partai partisan pemilu belakangan ini (2006:4). Walaupun terdapat berbagai identifikasi adanya berbagai media dengan ragam partisan politiknya; Media Indonesia diidentifikasi sebagai surat kabar dengan pilihan sikap nasionalis-sekuler yang terbesar di Indonesia (Idris dan Gunaratne, 2002:268-269; Hamad, 2004:51).

Kebijakan Media Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Surya Paloh. Ia dikenal sebagai “aktor politik sekaligus pelaku bisnis media” yang handal (Hamad, 2004:34). *CEO Media Group* sekaligus Ketua Dewan Pembina Golkar ini kerap menggunakan Media Indonesia dan MetroTV untuk kampanye dirinya dalam Konvensi Partai Golkar pada Pemilu 2004 serta secara gamblang menyuarakan sikap politik Golkar terkait dengan koalisi Golkar dengan PD pada Pemilu 2009 (Swestin, 2008:107; Inggrit, 2009:45-46). Merujuk David T. Hill, karir politik Paloh di Golkar, partai nasionalis sekuler terbesar, dimulai sejak 1971 dengan menjadi aktivis dan naik menjadi koordinator kampanye daerah Sumatra Utara dan Aceh (Hill, 1995:92).

Perkembangan politik yang terjadi dalam periode penelitian, stasiun berita ANTARA dan *matanews.com* menyebutkan bahwa Surya Paloh yang kalah dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Riau memutuskan mendukung Sri Mulyani dan pemerintah menghadapi gerakan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie yang kala itu memaksakan pengungkapan kasus Bank *Century*. Padahal, dalam kesempatan sebelumnya, *kompas.com* melansir pernyataan Surya Paloh yang tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat bila terpilih sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional Golkar.

Harian Seputar Indonesia merupakan diversifikasi usaha dari Media Nusantara Citra *Group* (MNC), raksasa media di Indonesia. Di bawah pengelolaan MNC, surat kabar nasional ini mampu menempati posisi tiras terbesar kedua setelah Kompas. Hingga penelitian ini berakhir, peneliti tidak menemukan kajian ataupun artikel ilmiah mengenai afiliasi langsung media tersebut dengan politik praktis

Indonesia. Bagi peneliti, posisi Harian Seputar Indonesia yang tidak berafiliasi politik serta memiliki tiras nasional dalam jumlah besar merupakan pembanding yang baik terhadap Media Indonesia yang berafiliasi politik dan memiliki distribusi nasional pula.

Periode penelitian dilakukan pada 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010, dimana proses seratus hari kerja awal kabinet berlangsung. Berita selama seratus hari ini menjadi ideal, mengingat dalam pemberitaan Media Indonesia dan Seputar Indonesia pada 30 Oktober 2009 disampaikan bahwa program-program yang dijadikan tema berita oleh media dilaksanakan pada kurun waktu tersebut, demikian pula para menteri dalam kabinet meluncurkan dan mengakhiri program 100 hari mereka bersama-sama.

Gambaran mengenai penelitian analisis isi peneliti peroleh melalui penelitian-penelitian skripsi mahasiswa bidang jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Analisis isi media menjadi teknik penelitian yang kerap dipilih dalam skripsi mahasiswa UAJY. Beberapa penelitian peneliti anggap relevan untuk dijadikan acuan dalam membangun kerangka penelitian ini.

Skripsi Birgitta Bestari Puspita Jati pada tahun 2008 mengenai “Objektivitas Pemberitaan tentang Epidemik Virus H5N1”, merupakan contoh mengenai pemahaman dan penggunaan kerangka objektivitas Westerstahl dalam penelitian. Melalui perbandingan terhadap pers asing *International Herald Tribune* dan pers nasional *The Jakarta Post* periode Januari 2005-Desember 2006 diketahui perbedaan objektivitas pada kedua media tidak terlalu signifikan, dengan

perbedaan *International Herald Tribune* kentara pada pemberitaan satu sisi, sementara *The Jakarta Post* cenderung multisisi (Jati, 2008:abstraksi xxi)

Skripsi “Pemberitaan Konflik di Jalur Gaza” milik Willibordus Tatag merupakan sebuah studi mengenai *media performance* pemberitaan pertempuran di Jalur Gaza antara tentara Israel dan Hamas dalam Harian Republika. Hasilnya menyebutkan dalam pemenuhan kategori *media performance*, Republika kurang memperhatikan dimensi keseimbangan dan netralitas pemberitaan (Hastungoro, 2010:103). Studi obyektivitas dalam SKH Kompas dan Media Indonesia menggunakan kode etik *American Society of Newspaper Editor* (ASNE) dilakukan Febrianto Palentinus pada 2010. Hasilnya menyebutkan pula perbedaan penerapan kode etik pada Media Indonesia dan Kompas terlihat signifikan, Media Indonesia cenderung tidak netral dalam pemberitaannya dan lebih banyak memberitakan dari satu sisi (Palentinus, 2010: abstraksi xiv).

Penelitian ini juga akan menambah kajian mengenai komunikasi dan politik (khususnya pemilu dan perkembangannya) di Indonesia, sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Disertasi Ibnu Hamad mengenai “Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa” menggunakan analisis wacana kritis untuk menelaah pencitraan 9 (sembilan) partai pada 10 (sepuluh) koran nasional selama kampanye Pemilu 1999 (Hamad, 2004:v). Riset Dewan Pers “Menyingkap Profesionalitas Kinerja Surat Kabar di Indonesia” menggunakan analisis *media performance* untuk menganalisis kualitas pemberitaan 28 koran nasional dan lokal di Pulau Jawa (Rahayu.ed., 2006:xviii). Riset Litbang Kompas pada November 2009 – Januari 2010 mengangkat kecenderungan nada pemberitaan (*tone*) terhadap

pemerintahan SBY (dalam Kompas, Jumat, 22 Januari 2010, “Surat Kabar Cenderung Bersikap Keras”). Sedangkan riset Hanta Yuda (2010) dan Firmanzah (2010) menyangkut kajian atas Pemilu 2009 dari perspektif ilmu politik dan tata negara.

D. Rumusan Masalah

Bagaimanakah *media performance* pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dalam Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *media performance* pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dalam Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010

F. Kerangka Teori

F.1. Definisi *Media Performance*

McQuail dalam bukunya “*Media Performance: Mass Communication and Public Interest*” merangkum analisis *media performance* sebagai

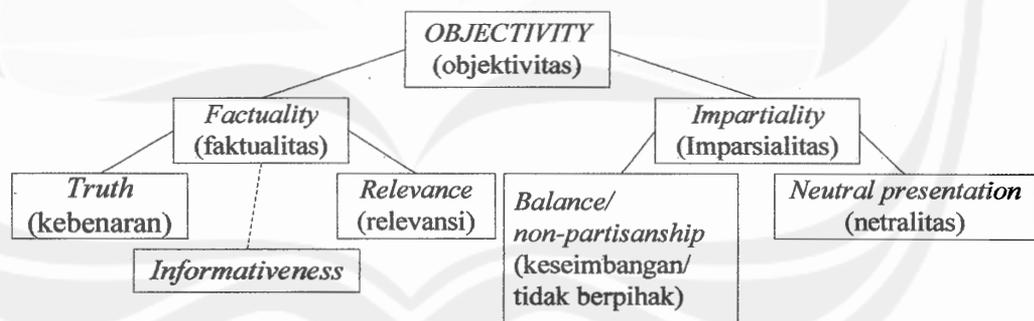
The independent assessment of mass media provision according to alternative “public interest” criteria, by way of objective and systematic methods of research, taking account of other relevant evidence and the normal operating conditions and requirements of the media concerned (McQuail, 1995:17).

Lebih lanjut dalam “*Mass Communication Theory*”, McQuail menyampaikan bahwa terdapat enam tujuan dilakukan analisis terhadap isi pesan komunikasi, yakni mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media; membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial; isi media merupakan refleksi

dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat; mengetahui fungsi dan efek media; mengevaluasi *media performance*; serta mengetahui apakah ada bias media (McQuail, 2000:305; Kriyantono, 2006:229).

Merujuk tulisan Tim Peneliti Dewan Pers, kualitas isi (*content*) merupakan tema sentral ketika kinerja media dilihat dari perspektif sosiologi dan politik (Rahayu.ed., 2006:6). Mengutip Mencher, Rahayu menyatakan elemen-elemen dalam tahap *news gathering* (berupa nilai berita, misalnya *timeliness, impact, importance, prominence, proximity-a situation the journalist feel compelled to reveal*) dan tahap *news writing* (berupa prinsip pemberitaan, seperti *accurate, balanced and fair, objective, well-written*) merupakan penentu kualitas berita (Rahayu.ed., 2006:7-8).

GAMBAR 1
Skema Objektivitas Westerstahl



Sumber : McQuail, 1995:196; Rahayu.ed., 2006:9

Riset Dewan Pers atas 28 koran nasional dan lokal di Jawa merupakan bentuk analisis *media performance*, untuk mengukur kualitas pemberitaan terbaik dan terburuk media pada tahun 2004 (Rahayu.ed., 2006:xviii; Kriyantono, 2006:239). Penelitian ini menggunakan unit analisis yang didasarkan pada pemikiran Westerstahl mengenai “objektivitas pemberitaan” dan analisis *media performance*

McQuail yang menyempurnakan gagasan Westerstahl tersebut. Dalam penelitian tersebut, tidak semua gagasan McQuail diadaptasi. Hal ini dilakukan karena gagasan tersebut tampil dalam pemahaman yang luas, sementara Dewan Pers membatasi dalam turunan unit kerja sederhana dan kecil (mikro) yang memungkinkan “konsep-konsep kinerja media” diterapkan secara objektif dalam analisis isi (Rahayu.ed., 2006:8).

Serupa dengan riset tersebut, penelitian ini menggunakan dua kategori pengukuran berupa perhitungan distribusi dan *cross tabulation* jawaban, serta pembobotan untuk mengetahui ranking 28 media itu (Rahayu.ed., 2006:36). Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan perhitungan distribusi dan *cross tabulation* untuk menggambarkan perbandingan performa tiap-tiap unit analisis yang digunakan pada kedua media. Sedangkan pembobotan kedua yang merangkum total skor dari unit-unit analisis untuk mengetahui ranking performa total media.

F.2. Kategori *Media Performance*

Seperti dikemukakan sebelumnya, studi *media performance* pemberitaan “100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua” dalam Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010 mengacu pada riset Dewan Pers tahun 2004 atas 28 koran nasional dan lokal di Jawa. Maka analisis ini dibangun atas kategori *media performance* berikut:

F.2.1. Kefaktualan (*factualness*)

Istilah kefaktualan dapat dipahami sebagai “derajat kefaktualan suatu berita” (Rahayu.ed., 2006:12). Sementara, faktual sendiri dapat disimpulkan sebagai

terhimpun atas fakta-fakta atau kumpulan data yang riil, benar terjadi di lapangan (Kusumaningrat, 2006:48-50). Maka, besar (derajat) kefaktualan sebuah berita berkaitan dengan kesesuaian pemberitaan terhadap fakta yang terjadi di lapangan.

Terdapat empat indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesesuaian pemberitaan terhadap fakta lapangan yaitu intisari berita (*main point*), nilai informasi, *readability*, dan *checkability* (Rahayu.ed., 2006:12; Kriyantono, 2006:239). Penelitian ini dilakukan dengan menentukan sebuah intisari dalam rangkaian berita. Intisari berita adalah pernyataan yang dianggap sebagai ringkasan dari teks berita. Biasanya berupa teras ringkasan atau klimaks dalam alinea pembukanya, kemudian diikuti rincian atau kronologi dalam urutan yang semakin menurun daya tariknya (Kriyantono, 2006:126).

Letak intisari berita pada teks dapat beragam antara lain di awal, di tengah, atau di akhir teks berita. Umumnya penulisan berita di surat kabar konvensional menggunakan prinsip jurnalistik “piramida terbalik” (Kusumaningrat, 2006:125). Prinsip ini meletakkan intisari atau pernyataan (*statement*) utama di awal teks berita sedangkan paragraf atau alinea lainnya untuk pengembangan berita secara lebih detail. Kriteria konvensional intisari berita ini yang digunakan dalam penelitian ini.

Jenis intisari berita (*main point*) pun beragam, terdiri atas fakta, opini, hingga percampuran keduanya. Berdasarkan prinsip jurnalistik, fakta merupakan dasar dalam menyusun intisari berita. Merujuk pada Kode Etik Jurnalistik Bab II Pasal lima, dijelaskan bahwa wartawan tidak menyajikan pendapatnya pribadi sebagai berita atau fakta yang ia dapatkan di lapangan, demikian pula bila berita

merupakan opini haruslah disajikan dengan menyebutkan nama penuturnya (Kusumaningrat, 2006:307). Mengingat tujuan penelitian ini ialah mengetahui representasi kinerja internal dalam menulis berita, keberadaan bentuk opini yang digunakan ialah pada adanya pendapat pribadi wartawan yang tersirat dalam teks berita.

Pengukuran indikator nilai informasi (*information value* atau *informativity*) dilakukan untuk mengetahui besar derajat kandungan informasi (*informativeness*) sebuah berita (Rahayu.ed., 2006:13). Sebuah berita yang baik akan mengandung informasi yang memadai (*informativeness* tinggi) untuk mengurangi keraguan atau ketidakpastian pembaca. Nilai informasi sebuah berita diukur berdasarkan tiga hal yaitu *density*, *breadth*, dan *depth* (Rahayu.ed., 2006:13).

Density (kepadatan informasi) merupakan banyaknya kesesuaian informasi; adanya beragam fakta-fakta yang disajikan dalam teks berita, yang relevan dan mendukung pemberitaan (Rahayu.ed., 2006:13). Dalam penelitian ini, suatu berita disebut memiliki kepadatan informasi yang baik bila mengangkat data lebih dari satu sumber, serta mendasarkan berita lebih dari satu fakta yang terungkap dari setiap narasumber. *Breadth* (keluasan informasi) merupakan adanya beragam perspektif informasi, pro dan kontra, yang tersaji dalam teks berita (Rahayu.ed., 2006:13-14). Penulisan berita yang baik akan menampilkan keluasan informasi berupa adanya beragam jenis pandangan, baik pro maupun kontra di dalamnya. *Depth* (kedalaman informasi) diartikan sebagai hadirnya fakta-fakta yang mendukung intisari berita yang dikemukakan oleh wartawan dalam sebuah teks

berita berita (Rahayu.ed., 2006:14). Fakta-fakta dianggap mendukung intisari berita bila tersusun sebagai kronologi atau rincian dari intisari berita.

Readability (kekayaan informasi) berkaitan dengan pengukuran redundansi; banyaknya satuan bahasa yang tidak diperlukan dalam berita (Rahayu.ed., 2006:14). *Readability* diukur berdasar tiga faktor yakni *pertama*, ada-tidaknya pengulangan frase atau parafrase yang dapat mengganggu pembaca. Frase merupakan gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif (KBBI, 2008:423), sedangkan pengulangan parafrase merupakan perubahan teks frase namun tetap memiliki makna yang sama. Pengulangan frase atau parafrase merupakan gangguan dalam teks berita. Selain membingungkan bagi pembaca, perulangan frase atau parafrase juga mengurangi efisiensi ruang dalam teks berita (Rahayu.ed., 2006:14).

Kedua, melihat adanya fungsi kalimat anak yang mendukung kalimat pokok dimana intisari berita berada. Kalimat anak merupakan kalimat kedua yang terletak setelah kalimat intisari berita, serta berada dalam alinea yang sama. Kalimat anak berfungsi sebagai pendukung atau penjelas kalimat intisari, dan berisi rincian lanjutan dari kalimat pokok (Rahayu.ed., 2006:14).

Ketiga, meneliti ada-tidaknya penggunaan kata asing atau istilah khusus yang dapat membingungkan pembaca (Rahayu.ed., 2006:14). Berkaitan dengan rujukan bahasa asing, Kusumaningrat menyampaikan pers semestinya mengurangi istilah asing dalam menyampaikan berita. Perkecualian terjadi apabila istilah asing itu tidak ada pengantinya dalam bahasa Indonesia (Kusumaningrat, 2006:166).

Indikator *checkability* (konfirmasi terhadap sumber berita) merupakan derajat sejauh mana fakta yang ditampilkan dapat diperiksa atau didukung oleh sumber yang kompeten dan bukti-bukti pendukung yang relevan (Rahayu.ed., 2006:14). *Checkability* diukur berdasarkan dua faktor, yakni ada-tidaknya sumber rujukan yang jelas dan ada-tidaknya sumber rujukan anonim (Rahayu.ed., 2006:14).

Kode Etik Jurnalistik Bab III pasal 13 menyebutkan bahwa kejelasan nama atau identitas narasumber perlu disebut, terkecuali atas permintaan narasumber; terhadap sumber yang identitasnya dirahasiakan hanya disebutkan “menurut sumber-“ tanpa menggunakan kata-kata “menurut sumber yang layak dipercaya” (Kusumangrat, 2006:310). Penyebutan sumber rujukan secara jelas akan membantu pemeriksaan kebenaran isi berita pada sumber berita.

Keberadaan sumber berita yang tidak jelas biasanya merupakan generalisasi atas pernyataan masyarakat sekitar, beberapa pihak atau golongan, tanpa disertai rujukan nama yang jelas. Dapat dilihat dengan adanya frase “menurut beberapa kalangan”, “beberapa saksi mata menyatakan”; “menurut masyarakat sekitar,” tanpa disebutkan secara jelas pihak-pihak yang berpendapat tersebut. Keberadaan sumber yang tidak jelas dalam berita akan menyulitkan pengecekan fakta pemberitaan.

Sesuai dengan prinsip jurnalistik, pemberitaan yang baik akan menghindari narasumber dengan identitas anonim berupa inisial nama atau nama samaran, serta memilih menggunakan pemakaian sumber non-anonim dan sumber rujukan yang jelas pula. Semakin sedikit ataupun tidak adanya rujukan anonim akan meningkatkan derajat *checkability*.

F.2.2. Akurasi (*accuracy*)

Akurat (*accurate*) merupakan kata sifat yang bermakna “*correct and exact, free from error*” (*Oxford Dictionary*, 1995:9). Akurasi merupakan salah satu unsur layak berita yang sangat penting bagi surat kabar. Terdapat tiga hal yang menyebabkan hal tersebut. *Pertama*, akurasi menunjukkan kualitas sebuah berita; *kedua*, akurasi sangat penting bagi subjek berita di mana reputasi dan kepentingannya dipertaruhkan oleh pemberitaan; *ketiga*, berkaitan dengan kredibilitas surat kabar tersebut di mata pembacanya (Rahayu.ed., 2006:15; Kusumaningrat, 2006:48-52). Dalam penelitian ini, akurasi diukur menggunakan dimensi verifikasi terhadap fakta, relevansi sumber berita, dan akurasi penyajian (Rahayu.ed., 2006:15).

Verifikasi terhadap fakta menyangkut sejauh mana berita sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan (Rahayu.ed., 2006:15). Verifikasi terhadap fakta diukur berdasarkan ada-tidaknya cek-riccek berita pada narasumber dalam satu teks berita –berupa konfirmasi pernyataan yang ditampilkan dalam teks berita yang sama dan dilakukan sebagai pembuktian bahwa fakta yang ditampilkan wartawan benar-benar terjadi di lapangan dan bukan karangan wartawan; ada atau tidaknya kelalaian dalam menyebutkan sumber berita; serta ada atau tidaknya kesalahan dalam pengutipan deksripsi (nama, gelar, institusi, alamat, dan sebagainya) dari narasumber (Rahayu.ed., 2006:15-17).

Relevansi sumber berita menyangkut kompetensi sumber berita sebagai sumber fakta; ada-tidak ada sumber berita yang relevan dalam mendukung berita. Kode Etik Jurnalistik Bab III Pasal 11 menjelaskan sumber berita dinilai memiliki

kewenangan apabila memenuhi syarat “kesaksian langsung, keterkenalan, pengalaman, jabatan terkait, serta keahlian” (Kusumaningrat, 2006:309). Pernyataan narasumber akan relevan bila berhubungan langsung dengan tema dan fokus pemberitaan. Relevansi sumber berita dalam penelitian ini dinilai dari ada atau tidaknya sumber yang kompeten dan relevan (mengalami atau ahli terhadap permasalahan) dari luar pemerintah; serta ada atau tidaknya berita resmi dari pemerintah (Rahayu.ed., 2006:17) –sebagai pihak yang memiliki bobot kepercayaan tinggi dan dinilai memiliki pengetahuan mendalam atas tema yang diangkat.

Merujuk McQuail, *akurasi penyajian* dapat dikatakan sebagai *internal accuracy* atau akurasi antar komponen. Dalam penelitian Dewan Pers yakni berupa konsistensi penelitian teknis berita berupa ejaan, kata dan tanda baca; kesesuaian antara judul dengan isi berita yang disajikan; dan tingkat kesesuaian antara penampilan foto dan teks dalam teks berita (Rahayu.ed., 2006:17). Pedoman dalam akurasi penggunaan bahasa tertulis ialah aturan tata bahasa, kamus, pedoman pemakaian bahasa dalam pers, dan pedoman ejaan yang disempurnakan (Kusumaningrat, 2006:168).

Akurasi penyajian berita dalam penelitian ini diukur berdasarkan ketepatan penggunaan ejaan kata dan tanda baca berdasarkan Ejaan yang Disempurnakan (EYD), serta kesesuaian antara judul dengan isi berita yang disajikan. Judul berita umumnya digunakan untuk merangkum isi berita kepada pembaca mengenai isi berita. Indikator yang menunjukkan judul berita yang sesuai dengan isi berita dapat merupakan kutipan frase dalam teks berita serta berhubungan, serta

bersangkut paut (koheren) dengan intisari berita. Sedangkan sub unit kesesuaian foto dengan teks berita tidak digunakan, mengingat tidak semua teks berita memiliki tampilan foto serta metode spesifik yang diperlukan untuk menganalisa gambar (misalnya semiotika).

F.2.3. Kelengkapan Isi Berita (*completeness*)

Completeness merupakan prasyarat informasi minimum yang harus dipenuhi sebuah berita, yakni prakondisi untuk memahami sebuah berita secara layak, menyajikan informasi yang lebih lengkap mengenai kejadian penting yang terjadi (Rahayu.cd., 2006:18). Keberadaan unsur-unsur ini akan memberikan pemahaman mendasar yang utuh dan benar bagi pembaca mengenai isi berita.

Kelengkapan isi berita terkait dengan rumusan klasik jurnalistik yang diangkat dari sajak Rudyard Kipling, yakni 5W+1H

I have six honest serving-men

(They're taught me all I knew)

*Their names are **What** and **Where** and **When***

*And **How** and **Why** and **Who***

(Kusumangrat, 2006:128).

Karenanya, sebuah berita dianggap lengkap apabila mengandung unsur :

- a. *what* (apa), menyatakan terjadinya suatu peristiwa. *What* menyebabkan jurnalis mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan para pelaku dan korban dalam sebuah kejadian.
- b. *who* (siapa), menyatakan orang-orang yang terlibat dan dilibatkan dalam realitas pemberitaan. Dalam pemberitaannya, jurnalis harus dapat mengidentifikasi berbagai atribut (nama, jabatan, dan sebagainya).

- c. *when* (kapan), menyatakan waktu terjadinya peristiwa kejadian yang diberitakan. Dapat meliputi masa lampau, saat ini, ataupun mendatang.
- d. *where* (di mana), menyatakan tempat berlangsungnya peristiwa yang diberitakan.
- e. *why* (mengapa), menyatakan penjelasan penyebab kenapa terjadinya peristiwa yang diberitakan.
- f. *how* (bagaimana), memaparkan bagaimana situasi yang terjadi dalam pemberitaan peristiwa.

F.2.4. Relevan (*relevance*)

Mengutip McQuail, *relevance* merupakan istilah kunci dalam menilai kualitas seleksi berita atau *news selection* (Rahayu.ed., 2006:19). Standar *relevance* yang lazim digunakan oleh kalangan jurnalis yaitu nilai berita (Rahayu, ed., 2006:20). Ashadi Siregar menyebutkan 6 kriteria layak berita yaitu *significance, timeliness, magnitude, proximity, prominence, dan human interest*.

Semakin banyak nilai berita yang mendekati unsur *significance*, maka semakin penting informasi tersebut bagi pembaca. Namun semakin banyak nilai berita yang mendekati unsur *human interest*, semakin menarik informasi tersebut bagi pembaca (Siregar, 1998:27-28).

GAMBAR 2
Unsur Nilai Berita (*News Values*)



Sumber : diolah dari (Siregar, 1998:27-28)

Dalam penelitian ini, digunakan enam dimensi standar nilai berita, yakni *proximity* psikografis (kedekatan secara emosional dan psikologis, keluarga, suku,

agama, profesi, kebangsaan, dengan unsur berita); *proximity* geografis (kedekatan cakupan distribusi media dengan pembaca); *timeliness* (meliputi aktualitas objektif; peristiwa baru saja terjadi atau aktualitas subjektif; peristiwa yang disajikan berhubungan dengan peristiwa lain yang baru saja terjadi); *significance* (peristiwa memiliki pengaruh pada kondisi nasional pembaca); *prominence* (adanya keterlibatan tokoh terkemuka dalam sajian peristiwa); dan *magnitude* yakni adanya sajian besaran peristiwa dalam bentuk angka (Rahayu,ed., 2006:20-22; Siregar, 1998:27-28).

Sedangkan nilai *human interest* tidak digunakan dalam penelitian, mengingat tema pemberitaan menekankan pada nilai penting tema yang diangkat di mata pembaca. Selain itu, sesungguhnya tidak satu pun berita dapat dimuat di surat kabar tanpa memiliki nilai *human interest* (Kusumangrat, 2006:64). Demi membedakannya, dunia jurnalistik memberikan kekhasan nilai tersebut pada *softnews* dan *feature* yang memiliki karakteristik penekanan pada emosional dan sentuhan perasaan manusia (Kusumangrat, 2006:219). Karakteristik tersebut berseberangan dengan penelitian yang mengangkat *hardnews* sebagai sampel penelitian.

F.2.5. Keseimbangan (*balance*)

Balance dalam khazanah jurnalistik diartikan sebagai keseimbangan dalam pemberitaan (Rahayu.ed., 2006:22). Unsur keseimbangan berita sama sulitnya dicapai seperti halnya keakuratan dalam menyampaikan fakta, karena wartawan harus menempatkan kumpulan fakta dalam proporsi yang wajar, mengaitkannya

secara berarti dengan unsur-unsur lainnya, serta membangun segi pentingnya dengan berita secara keseluruhan (Kusumaningrat, 2006:53).

Mengutip McQuail, Rahayu membedakan aspek evaluatif pemberitaan menjadi dua, yakni keseimbangan dan netralitas. *Balance* berhubungan dengan penghilangan (seleksi) atas fakta-fakta yang mengandung ekspresi apa saja yang dianggap oleh pihak-pihak dalam pemberitaan sebagai “fakta”, sedangkan netralitas lebih berhubungan dengan presentasi fakta itu sendiri yang dapat dievaluasi dari penggunaan kata-kata untuk membentuk citra serta gaya presentasi yang berbeda.

Dalam meneliti *balance*, yang dicari ialah denotasi, sedangkan dalam meneliti netralitas, dicari konotasi (Rahayu.ed.,2006:10-11). Pengukuran *balance* yang tinggi akan terlihat dari adanya *equal* atau *proportional access* (pemberian akses yang sama untuk semua aktor yang terlibat) dan *even-handed evaluation* (penilaian yang berimbang pada masing-masing aktor yang terlibat dalam berita).

Dalam penelitian ini, dimensi *balance* diukur berdasarkan tiga elemen, yakni ada-tidaknya representasi atau penampilan satu sisi (*source bias*) dalam pemberitaan, yang dapat dilihat dari ketidakseimbangan sumber berita yang dikutip dalam peliputan (Rahayu.ed., 2006:22-23). Absennya salah satu pendapat dalam berita akan membuat aspek *balance* berkurang.

Kedua, ada atau tidaknya *slant* atau opini yang ditemui dalam teks berita yang memberikan gambaran spesifik mengenai kecondongan media. *Slant* dapat berupa opini pujian ataupun kritikan (Rahayu.ed., 2006:23). *Ketiga*, ada-tidaknya representasi yang tidak seimbang antara pendapat pro-kontra dalam porsi alinea

berita, yang dapat dilihat dari keseimbangan jumlah alinea yang merepresentasikan masing-masing pernyataan pro-kontra dalam suatu teks berita (Rahayu.ed., 2006: 23).

F.2.6. Ketidakberpihakan atau Netralitas (*neutrality*)

Berbeda dengan *balance*, *neutrality* lebih berkaitan dengan aspek presentasi fakta suatu berita yang dapat menimbulkan sensasionalisme dan emosionalisme (Rahayu.ed., 2006:24). Dalam penelitian ini, netralitas akan diukur berdasarkan ada-tidaknya empat hal. Pertama, adanya *sensasionalisme* dalam berita.

Sensasionalisme berita diukur melalui tiga hal yakni personalisasi dalam berita, yakni adanya tokoh yang dominan dan paling berpengaruh daripada tokoh lainnya dalam suatu peristiwa (Rahayu.ed., 2006:25); penonjolan aspek emosional-suka, benci, marah, sedih, gembira, ataupun opini peneliti, dibandingkan aspek rasional dalam berita (Rahayu.ed., 2006:25); serta dramatisasi atau penulisan berita yang hiperbolik dan melebih-lebihkan suatu fakta untuk memberi kesan dramatis (Rahayu.ed., 2006:25).

Kedua, ada-tidaknya *stereotype* berupa penggunaan atribut kata tertentu yang berasosiasi pada tokoh atau kelompok dalam penyajian berita (Rahayu.ed., 2006:25). Meskipun asosiasi makna dapat berupa konotasi positif, penggunaan stereotype dapat mengundang tuduhan keberpihakan wartawan terhadap salah satu kelompok dalam masyarakat (Rahayu.ed., 2006: 26).

Ketiga, adanya *juxtaposition*. *Juxtaposition* secara sederhana dapat diartikan perbandingan dua hal yang tidak sebanding (Rahayu.ed., 2006:26). Efek yang ingin ditimbulkan ialah efek kontras, dengan menyajikan dua fakta yang berbeda

dan tidak berhubungan untuk menghasilkan kesan dramatis dalam berita (Rahayu.ed., 2006:26).

Keempat, adanya *linkages* yakni membandingkan dua hal yang tidak berhubungan untuk menimbulkan efek asosiatif (Rahayu.ed., 2006:26). Dengan menggabungkan cerita yang berbeda, wartawan ingin membangun *mood* atau kesatuan atas keragaman sehingga keduanya seakan memiliki efek asosiatif atau sebab-akibat (Rahayu.ed., 2006:26).

G. Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan mencatat identitas surat kabar (edisi, hari, tanggal, tahun terbit, judul berita). Kemudian analisis dilanjutkan dengan menggunakan unit analisis dan kategorisasi berikut untuk mengevaluasi berita.

TABEL 1
Unit Analisis dan Kategorisasi Penelitian

| Dimensi | Unit Analisis | Sub Unit Analisis | Pilihan Jawaban |
|--|---|--|--|
| 1. Kefaktualan (<i>factualness</i>) | a. Intisari berita (<i>main point</i>) | a. Letak intisari berita | a. di awal b. di tengah c. di akhir |
| | | b. Jenis intisari berita | a. fakta b. opini c. percampuran fakta-opini |
| | b. Nilai informasi (<i>informativity</i>) | a. Adanya kepadatan informasi (<i>density</i>) | a. ya b. tidak |
| | | b. Adanya keluasan informasi (<i>breadth</i>) | a. ya b. tidak |
| | | c. Adanya kedalaman informasi (<i>depth</i>) | a. ya b. tidak |
| | c. Kekayaan informasi (<i>readability</i>) | a. Adanya pengulangan frase/parafrase pada teks berita | a. ya b. tidak |
| | | b. Adanya kalimat anak yang mendukung kalimat utama | a. ya b. tidak |
| | | c. Adanya istilah atau kata asing | a. ya b. tidak |

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| | d. Konfirmasi pada sumber (<i>checkability</i>) | a. Adanya sumber rujukan yang jelas | a. ya b. tidak |
| | | b. Adanya sumber rujukan anonim | a. ya b. tidak |
| 2. Akurasi (<i>accuracy</i>) | a. Verifikasi fakta | a. Adanya cek dan ricek terhadap berita yang ditulis | a. ya b. tidak |
| | | b. Adanya kelalaian pencantuman sumber berita | a. ya b. tidak |
| | | c. Adanya kesalahan pengutipan data narasumber | a. ya b. tidak |
| | b. Relevansi sumber berita | a. Adanya sumber di luar pemerintah | a. ya b. tidak |
| | | b. Adanya sumber berita dari pemerintah | a. ya b. tidak |
| | c. Akurasi penyajian | a. Adanya ketepatan penggunaan ejaan kata dan tanda baca | a. ya b. tidak |
| b. Kesesuaian judul dengan isi berita | | a. ya b. tidak | |
| 3. Kelengkapan Isi (<i>completeness</i>) | Kelengkapan unsur 5W+1H | a. Unsur "what" | a. ya b. tidak |
| | | b. Unsur "who" | a. ya b. tidak |
| | | c. Unsur "when" | a. ya b. tidak |
| | | d. Unsur "where" | a. ya b. tidak |
| | | e. Unsur "why" | a. ya b. tidak |
| | | f. Unsur "how" | a. ya b. tidak |
| 4. Relevansi (<i>relevance</i>) | a. Kedekatan (<i>proximity</i>) psikografis | Adanya kedekatan informasi dengan emosi atau psikologis pembaca | a. ya b. tidak |
| | b. Kedekatan (<i>proximity</i>) geografis | Adanya kedekatan peristiwa dengan lokasi pembaca | a. ya b. tidak |
| | c. Aktualitas (<i>timeliness</i>) | a. Peristiwa baru saja terjadi (aktualitas obyektif) | a. ya b. tidak |
| b. Peristiwa yang | | a. ya | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| | | disajikan berhubungan dengan peristiwa lain yang baru saja terjadi (aktualitas subyektif) | b. tidak |
| | d. <i>Significance</i> | Peristiwa memiliki pengaruh pada kondisi pembaca | a. ya b. tidak |
| | e. <i>Prominence</i> | Adanya keterlibatan tokoh terkemuka dalam sajian peristiwa | a. ya b. tidak |
| | f. <i>Magnitude</i> | Adanya sajian besaran peristiwa dalam bentuk angka | a. ya b. tidak |
| 5. Keseimbangan (<i>balance</i>) | a. <i>Source bias</i> | Adanya representasi satu sisi dalam pemberitaan | a. ya b. tidak |
| | b. <i>Slant</i> | Adanya kritikan/pujian yang merupakan opini wartawan | a. ya b. tidak |
| | c. Representasi pro-kontra | Adanya keseimbangan porsi alinea dalam representasi pro-kontra | a. ya b. tidak |
| 6. Netralitas (<i>neutrality</i>) | a. Sensasionalisme | a. Adanya personalisasi (aktor/sumber yang ditampilkan paling dominan) | a. ya b. tidak |
| | | b. Adanya aspek emosional (suka, benci, marah) yang lebih besar dari aspek rasional dalam sajian | a. ya b. tidak |
| | | c. Adanya penyajian berita secara hiperbolik | a. ya b. tidak |
| | b. Stereotipe | Penggunaan asosiasi kata tertentu berkaitan dengan aktor/sumber sajian berita | a. ya b. tidak |
| | c. <i>Juxtaposition</i> | Adanya pembandingan dua hal yang tidak sebanding untuk mengesankan efek dramatis peristiwa | a. ya b. tidak |
| | d. <i>Linkages</i> | Membandingkan dua hal yang tidak relevan | a. ya b. tidak |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | menjadi seakan memiliki hubungan sebab-akibat | |
|--|--|---|--|

diolah dari Kriyantono, 2006:240; Rahayu, 2006:27

H. Definisi Konsep

Media performance merupakan penilaian atas kualitas pemberitaan media mengenai sebuah tema atau peristiwa. Dengan demikian penelitian ini berdiri sebagai bentuk penilaian atas pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dalam Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia terhadap fakta yang terjadi selama periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010.

I. Definisi Operasional

Definisi operasional dibangun atas kesesuaian (koherensi) antara dimensi yang dimiliki *media performance* dengan definisi konsep dalam penelitian. Dengan demikian, definisi serta indikator setiap bangun definisi operasional dimaknai berdasarkan bangun dimensi *media performance* dalam kerangka teori (lihat Kerangka Teori, hlm.13).

I.1. Kefaktualan (*factualness*)

Kefaktualan merupakan besar nilai kesesuaian antara pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dalam Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia terhadap fakta yang sebenarnya terjadi selama periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010. Empat indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesesuaian pemberitaan terhadap fakta lapangan yaitu intisari berita, nilai informasi, kekayaan informasi, dan konfirmasi pada sumber berita.

I.1.1. Intisari berita (*main point*)

I.1.1.a. Letak intisari berita

Melalui letak intisari berita akan dilihat bagaimana wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia bekerja berdasarkan prinsip jurnalistik “piramida terbalik” dalam penyusunan berita, yakni meletakkan intisari utama di awal teks berita. Penilaian performa positif diberikan pada intisari berita yang terletak pada awal berita.

I.1.1.b. Jenis intisari berita

Melalui jenis intisari berita akan dilihat bagaimana wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia memberitakan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, apakah mengutamakan fakta, opini pribadi wartawan, atau mencampurkan keduanya dalam berita.

Prinsip jurnalistik menekankan fakta sebagai intisari berita dan dasar pemberitaan. Keberadaan opini wartawan dapat ditandai dengan penggunaan kata “tampaknya”, “sepertinya”, “kelihatannya”, “kebanyakan”, “ibarat”, “bagaikan”, “sayangnya”, “malangnya”, dan sebagainya.

I.1.2. Nilai informasi (*information value* atau *informativity*)

Yakni besar derajat kandungan informasi dalam pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua pada Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010. Nilai informasi sebuah berita diukur berdasarkan tiga hal yaitu kepadatan informasi, keluasan informasi, dan kedalaman informasi.

I.1.2.a. Kepadatan informasi (*density*)

Menyatakan ada-tidaknya kesesuaian informasi, yakni proporsi (jumlah) informasi relevan yang disajikan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia

dalam berita. Informasi yang diberikan dapat berupa pernyataan ataupun data dari narasumber mengenai pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

Semakin banyak (padat) jumlah fakta yang tersaji sebagai pendukung tema berita, akan semakin tinggi nilai informasi sebuah pemberitaan. Misalkan: pada pemberitaan seputar kerasnya berita surat kabar terhadap pemerintahan SBY (dalam *Kompas*, Jumat, 22 Januari 2010, “Surat Kabar Cenderung Bersikap Keras”), maka berita yang memenuhi unsur kepadatan informasi akan mengangkat berbagai fakta yang berhubungan dan sesuai dengan tema berita – hasil jajak pendapat persepsi publik mengenai pemberitaan pemerintahan di media massa; media apa sajakah yang dianggap keras dalam memberitakan; serta tanggapan dari pengamat, politisi, akademisi.

1.1.2.b. Keluasan informasi (*breadth*)

Menyatakan ada-tidaknya keragaman perspektif informasi atau sumber fakta (perbedaan pro-kontra) yang tersaji dalam teks berita Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia seputar pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Keragaman informasi bertujuan memperjelas intisari berita.

Misalkan: pada pemberitaan seputar kerasnya berita surat kabar terhadap pemerintahan SBY (dalam *Kompas*, Jumat, 22 Januari 2010, “Surat Kabar Cenderung Bersikap Keras”), maka berita yang mengandung keluasan informasi akan mengangkat pendapat bernada pro ataupun kontra–tanggapan dari pengamat, politisi, akademisi; baik yang setuju maupun tidak atas sikap keras media.

Semakin tinggi keragaman (pro-kontra) informasi yang mendukung intisari berita, maka aspek *breadth* pemberitaan semakin terpenuhi.

I.1.2.c. Kedalaman informasi (*depth*)

Menyatakan ada-tidaknya fakta-fakta yang mendukung intisari berita yang dikemukakan oleh wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Semakin banyak fakta yang disajikan sebagai pendukung dan memperkuat intisari berita oleh wartawan maka unsur *depth* semakin kuat.

Misalkan: pada pemberitaan seputar kerasnya berita surat kabar terhadap pemerintahan SBY (dalam *Kompas*, Jumat, 22 Januari 2010, "Surat Kabar Cenderung Bersikap Keras"), maka berita yang mendalam akan mengangkat alasan-alasan penyebab mengapa media massa cenderung bernada (*tone*) kritis dan keras.

I.1.3. Kekayaan informasi (*readability*)

Readability diukur berdasar tiga faktor yakni :

I.1.3.a. Ada-tidaknya pengulangan frase atau parafrase yang dapat mengganggu pembaca dalam pemberitaan "100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua". Semakin banyak pengulangan frase atau parafrase akan semakin membuat pembaca terganggu (terdistorsi). Semakin sedikit pengulangan akan membantu pembaca untuk mencermati berita.

I.1.3.b. Melihat fungsi kalimat anak dalam berita pilihan di Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesiayang mendukung kalimat pokok dimana intisari

berita berada. Kalimat anak yang ideal berfungsi sebagai keterangan dari kalimat pokok.

Misalkan: pada pemberitaan seputar kerasnya berita surat kabar terhadap pemerintahan SBY (dalam *Kompas*, Jumat, 22 Januari 2010, “Surat Kabar Cenderung Bersikap Keras”), bila intisari berita menegaskan berita tersebut merupakan hasil kerja litbang *Kompas*, maka kalimat anak dapat menjelaskan bagaimana riset tersebut dilakukan. Semakin baik dalam mendukung atau menjelaskan *main point* dalam kalimat pokok maka tingkat kekayaan informasi berita akan semakin baik.

I.1.3.c. Meneliti ada-tidaknya penggunaan kata asing atau istilah khusus yang membingungkan pembaca. Semakin banyak penggunaan istilah atau kata asing yang tidak populer akan membuat pembaca terganggu (terdistorsi). Penggunaan istilah asing sebaiknya dikurangi pula untuk memperkaya khazanah budaya dan bahasa nasional.

Semakin sedikit penggunaan istilah asing dalam pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua akan membantu pembaca untuk mencermati berita dan meningkatkan derajat kefaktualan berita.

I.1.4 Konfirmasi pada sumber berita (*checkability*)

Merupakan derajat sejauh mana fakta yang ditampilkan dalam pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dapat diperiksa atau didukung oleh sumber yang dikenal baik dan bukti-bukti pendukung yang relevan. *Checkability* diukur berdasarkan dua faktor,

I.1.4.a. Yakni ada atau tidaknya sumber rujukan yang jelas dalam pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

Berita yang baik akan menampilkan pernyataan narasumber atau sumber rujukan yang jelas identitasnya dan berkaitan dengan topik berita. Semakin jelas identitas narasumber dengan berita akan semakin memenuhi derajat *checkability*. Misalkan saja berita implementasi program ekonomi kabinet akan melibatkan pernyataan Faisal Basri dan Afiliani (adanya penyebutan identitas jelas atau nama terang narasumber).

Keberadaan sumber berita yang tidak jelas biasanya merupakan generalisasi atas pernyataan masyarakat sekitar, beberapa pihak atau golongan, tanpa disertai rujukan nama yang jelas. Dapat dilihat dengan adanya frase “menurut beberapa kalangan”, “beberapa saksi mata menyatakan”; “menurut masyarakat sekitar,” tanpa disebutkan secara jelas pihak-pihak yang berpendapat tersebut. Keberadaan sumber yang tidak jelas dalam berita akan menyulitkan pengecekan fakta pemberitaan.

I.1.4.b. Ada atau tidaknya sumber rujukan anonim dalam pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

Sesuai dengan prinsip jurnalistik, pemberitaan yang baik akan menghindari narasumber dengan identitas berupa inisial nama atau nama samaran, serta memilih menggunakan pemakaian sumber non-anonim dan sumber rujukan yang jelas pula. Semakin sedikit ataupun tidak adanya rujukan anonim akan meningkatkan derajat *checkability*.

I.2. Akurasi (*accuracy*)

I.2.1. Verifikasi fakta

Menyangkut sejauh mana berita sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Verifikasi terhadap fakta diukur berdasarkan:

I.2.1.a. Ada-tidaknya cek dan ricek berita pada narasumber, yakni dengan adanya konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam bentuk tanggapan tokoh yang membenarkan atau menegaskan dalam sebuah teks pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Cek dan ricek berita harus berlangsung pada teks berita yang sama. Misalkan saja isu surplus penerimaan dalam negeri itu diakui oleh Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian (kalimat fiktif).

I.2.1.b. Ada-tidaknya kelalaian ataupun kesalahan wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam mencantumkan rujukan berita (narasumber). Kelalaian ini menyebabkan berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua tidak dapat diverifikasi di lapangan dan memiliki tingkat kredibilitas yang rendah.

Misalkan saja penyimpulan jumlah angka kemiskinan secara spesifik tanpa menyebutkan sumber rujukan data. Akibatnya, data statistik akan terkesan menjadi karangan wartawan saja.

I.2.1.c. Ada-tidaknya kesalahan pengutipan deksripsi (nama, gelar, institusi, alamat, dan sebagainya) dari narasumber berita oleh wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

Misalkan saja: Rekam jejak Fadel Muhamad (seharusnya Muhammad) yang dulunya menjabat Gubernur Papua Barat (seharusnya Gorontalo) semakin cemerlang dengan menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode ini (kalimat fiktif).

I.2.2. Relevansi sumber berita

Relevansi sumber berita menyangkut kedekatan informasi atau pengalaman yang dimiliki narasumber dengan isi berita. Besar derajat relevansi narasumber dengan berita yang diangkat dilihat dari :

I.2.2.a. Ada atau tidaknya sumber kompeten dan relevan (mengalami atau ahli terhadap permasalahan) di luar pemerintah yang diangkat wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam memberitakan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

Semakin relevan sumber berita non-pemerintah terhadap masalah yang diangkat maka tingkat verifikasi berita semakin baik pula. Misalnya berita implementasi program ekonomi kabinet akan melibatkan pernyataan ekonom Faisal Basri dan Afiliani.

I.2.2.b. Ada-tidaknya berita resmi dari pemerintah yang diangkat wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam memberitakan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Berita resmi dari pemerintah memiliki nilai relevansi dan kompetensi yang tinggi di mata pembaca.

Semakin relevan sumber berita terhadap masalah yang diangkat maka tingkat verifikasi berita semakin baik pula. Misalkan saja program pemerintah mengenai isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi memerlukan konfirmasi

pernyataan (*statement*) dari Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun rilis data resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

I.2.3. Akurasi penyajian

Besar derajat akurasi penyajian berita dinilai dari :

I.2.3.a. Ada-tidaknya ketepatan penggunaan ejaan kata dan tanda baca yang memenuhi kaedah jurnalistik dalam memberitakan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Semakin tinggi tingkat konsistensi penelitian berita berupa ejaan kata maupun tanda baca maka semakin tinggi pula akurasi penyajian beritanya.

I.2.3.b. Kesesuaian antara judul dengan isi berita yang disajikan wartawan Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam memberitakan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Pemilihan judul yang baik akan menggambarkan dan mendukung kebenaran isi berita yang hendak dibaca. Semakin tinggi kesesuaian judul dengan isi berita semakin tinggi pula akurasi penyajian beritanya.

I.3. Kelengkapan isi berita (*completeness*)

Kelengkapan isi berita terkait dengan keenam unsur :

I.3.1. Ada-tidaknya *what* (apa), menyatakan terjadinya suatu peristiwa. *What* menyebabkan wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan para aktor dalam memberitakan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

I.3.2. Ada-tidaknya *who* (siapa), menyatakan orang-orang yang terlibat dan dilibatkan dalam pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Dalam pemberitaannya, wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia

harus dapat mengidentifikasi berbagai atribut (nama, jabatan, dan sebagainya).

I.3.3. Ada-tidaknya *when* (kapan), menyatakan waktu terjadinya peristiwa kejadian berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Dapat meliputi masa lampau, saat ini, ataupun mendatang.

I.3.4. Ada-tidaknya *where* (di mana), menyatakan tempat berlangsungnya peristiwa berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

I.3.5. Ada-tidaknya *why* (mengapa), menyatakan penjelasan penyebab terjadinya peristiwa berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

I.3.6. Ada-tidaknya *how* (bagaimana), memaparkan situasi yang terjadi dalam pemberitaan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

I.4. Relevan (*relevance*)

Dalam dimensi *media performance* ini, digunakan enam dimensi standar nilai berita, yakni

I.4.1. Kedekatan (*proximity*) psikografis, yakni ada atau tidaknya kedekatan pembaca secara emosional dan psikologis (keluarga, suku, agama, profesi, kebangsaan, dan sebagainya) dengan berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua yang diangkat Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia.

I.4.2. Kedekatan (*proximity*) geografis, yakni ada atau tidaknya kedekatan cakupan distribusi media dan lokasi peristiwa dengan pembaca Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia.

I.4.3. Aktualitas (*timeliness*), yakni

I.4.3.a. Aktualitas objektif, yakni pembaca Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia menganggap berita seputar 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua baru saja terjadi.

I.4.3.b. Aktualitas subjektif, yakni pembaca Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia menganggap berita yang disajikan terbilang lampau, namun berhubungan dengan peristiwa lain yang baru saja terjadi.

I.4.4. *Significance*, yakni pembaca menganggap berita seputar 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua yang dibaca memiliki pengaruh pada kondisi nasional pembaca.

I.4.5. *Prominence*, yakni ada atau tidaknya keterlibatan tokoh terkemuka dalam sajian berita seputar 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

I.4.6. *Magnitude*, yakni ada atau tidaknya disertakan data dalam bentuk angka seputar berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua yang dibaca.

I.5. Keseimbangan (*balance*)

Dalam penelitian ini, dimensi *balance* diukur berdasarkan tiga elemen, yakni

I.5.1. Ada-tidaknya representasi atau penampilan satu sisi (*source bias*) dalam berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, yang dapat dilihat dari ketidakseimbangan sumber berita yang dikutip wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam peliputan. Misalkan saja kecenderungan nada berita (*tone*) yang hanya mengangkat komentar dari pihak pengkritik pemerintah saja.

I.5.2. Ada-tidaknya *slant*, yakni pujian yang memberikan gambaran positif berisi opini wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia ataupun opini negatif/kritikan seputar berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

Dalam menyajikan berita, seringkali media memberikan kritikan atau pujian yang berasal dari media itu sendiri, alih-alih pernyataan narasumber. Misalkan saja terselip komentar opini bahwa Presiden SBY sungguh layak diberikan selamat atas keberhasilannya memimpin dan manuver cantiknya dalam berpolitik.

I.5.3. Ada atau tidaknya representasi seimbang yang dihadirkan wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia antara pendapat pro-kontra dalam porsi alinea berita berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Misalkan saja alinea pemberitaan yang didominasi pernyataan pesimis atas kinerja kabinet SBY, tanpa menghadirkan sanggahan dalam porsi yang sama.

I.6. Ketidakberpihakan atau netralitas (*neutrality*)

Dalam penelitian ini, netralitas akan diukur berdasarkan ada-tidaknya empat hal

I.6.1. Adanya *sensasionalisme* dalam berita

Sensasionalisme berita diukur melalui tiga hal yakni

I.6.1.a. Ada-tidaknya personalisasi dalam berita, yakni adanya tokoh yang dominan dan paling berpengaruh daripada tokoh lainnya dalam teks berita wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia seputar berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Misalkan penonjolan sosok SBY sebagai presiden yang sangat berkarisma serta komentar-komentarnya yang mendominasi alinea-alinea sebuah teks berita.

I.6.1.b. Ada-tidaknya penonjolan aspek emosional-suka,benci, marah, sedih, gembira, ataupun opini peneliti, dibandingkan aspek rasional dalam berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

I.6.1.c. Ada-tidaknya dramatisasi atau penelitan berita yang hiperbolik dan melebih-lebihkan suatu fakta (sangat, luar biasa) untuk memberi kesan dramatis dalam memberitakan berita “100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua”. Misalkan : Kabinet SBY sukses menekan ledakan angka kemiskinan (kalimat fiktif). Kata “ledakan” seakan-akan menunjukkan bahwa angka kemiskinan naik secara drastis dan gawat, sementara penggunaan kata “sukses” menunjukkan hal tersebut dilakukan dengan sangat baik.

I.6.2. Ada-tidaknya *stereotipe* berupa penggunaan atribut kata tertentu yang berasosiasi pada tokoh atau kelompok dalam berita 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Meskipun asosiasi makna dapat berupa konotasi positif, penggunaan stereotipe dapat mengundang tuduhan keberpihakan wartawan terhadap salah satu kelompok dalam masyarakat. Misalkan saja penyebutan Faisal Basri dan tim ekonomi kabinet sebagai kelompok ekonom liberal dan pro kapitalis.

I.6.3. Ada-tidaknya *juxtaposition*, yakni wartawan Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia menghadirkan perbandingan dua hal yang tidak sebanding dalam berita. Efek yang ingin ditimbulkan ialah efek kontras, dengan menyajikan dua fakta yang berbeda dan tidak berhubungan untuk menghasilkan kesan dramatis dalam berita. Misalkan: penokohan pemerintah *incumbent* dan kebijakannya sebagai tokoh jahat dalam teks berita, sementara pihak oposisi sebagai tokoh baik yang terus mengkritisi dan melindungi rakyat.

I.6.4. Ada-tidaknya *linkages*, yakni wartawan SKH Media Indonesia dan Seputar Indonesiamembandingkan dua hal yang tidak berhubungan untuk menimbulkan

efek asosiatif dalam teks berita. Misalkan: mengaitkan maraknya perjudian sebagai penyebab tersendatnya pembangunan Indonesia secara makro, atau mengasosiasikan fakta adanya partai berideologi agama dalam koalisi sebagai pertanda berubahnya haluan Indonesia menjadi negara agama.

J. Metodologi Penelitian

a) Teknik Penelitian

Terdapat beragam deskripsi riset analisis isi yang dikemukakan para ahli. Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan valid dari data sesuai konteksnya (Krippendorff, 1991:15; Wimmer dan Dominick, 2003:141).

Definisi ini mensyaratkan jika peneliti dalam waktu dan keadaan yang berbeda, melakukan penelitian terhadap data yang sama, dengan teknik yang sama pula, maka hasilnya harus sama. Inilah yang dijelaskan sebagai metode analisis isi menghasilkan data hasil yang handal (*reliable*). Krippendorff menekankan pada data, yakni kejelasan data mana yang dianalisis, bagaimana data ditentukan, bagaimana data diambil; tanpa menghadirkan konteks data sendiri (Krippendorff, 1991:23-24).

Merujuk Kerlinger, analisis isi menyebutkan tiga prinsip yang memerlukan elaborasi, yakni sistematis, objektif, dan kuantitatif, terhadap pesan yang tampak. Ketiganya merupakan turunan dari definisi analisis isi versi Kerlinger, yang bagi Wimmer dan Dominick merupakan gagasan penguat atas definisi Krippendorff sebelumnya (Wimmer dan Dominick, 2003:141; Kriyantono, 2006:228).

Sistematis, yakni bahwa dalam analisis isi peneliti harus menggunakan prosedur dan aturan yang sama untuk menganalisis semua data dalam penelitian. Dengan demikian, terdapat ragam prosedur standar yang baku dan pasti untuk diterapkan walaupun dalam waktu dan pada sampel penelitian yang berbeda. *Objektif*, yakni prinsip yang menekankan adanya kesamaan hasil apabila penelitian kembali dilakukan peneliti lain. Karenanya, Kerlinger menuntut penentuan definisi operasional dan klasifikasi variabel penelitian yang tepat (*exact*) dan jelas.

Kuantitatif, merujuk pada tujuan analisis isi yakni memperoleh representasi akurat atas keseluruhan isi pesan (*representation a body of message*). Karenanya, penghitungan (statistik) penting dalam analisis isi karena akan memberikan bantuan statistika dalam mencapai keakuratan interpretasi dan analisis pesan (berita). Kriyantono menambahkan prinsip *isi yang nyata*, sebagai penegasan bahwa yang diteliti adalah isi pesan yang tersurat (tampak), bukan atas makna yang dirasakan peneliti (Kriyantono, 2006:229).

Menurut Babbie kelebihan analisis isi antara lain:

1. Hemat waktu, tenaga dan biaya. Dari segi biaya dapat diminimalisasi dan juga dari segi waktu, dapat diprediksi kapan penelitian akan diselesaikan.
2. Analisis isi lebih aman dilakukan. Analisis isi relatif aman dilakukan dalam arti, analisis isi memiliki risiko kegagalan yang sangat minim.
3. Analisis isi memungkinkan kita meneliti dalam jangka waktu yang sangat panjang. Misalkan saja tema *headline news* yang dimuat di surat kabar dalam setahun.

4. Analisis isi tidak memiliki efek sosial karena objeknya bersifat pasif. Analisis isi memanfaatkan data yang sudah ada dan dipublikasikan kepada khalayak umum.

(seperti dikutip Martono, 2010: 97-99)

Bagi peneliti, teknik analisis isi sangat membantu dalam menyederhanakan proses penelitian. Data yang dibutuhkan untuk penelitian telah tersedia dan dapat diakses oleh publik baik dalam bentuk buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah. Kliping teks berita peneliti peroleh melalui perpustakaan yang berlangganan kedua media tersebut (yakni perpustakaan pusat Universitas Gajah Mada dan Universitas Sanatu Dharma Yogyakarta) serta akses *online* pada kedua media. Dengan analisis isi, peneliti dimungkinkan pula untuk menganalisa teks berita dalam jumlah yang masif dan periode waktu yang cukup panjang (yakni pada 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010).

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni memilih berita-berita dalam rubrik nasional yang diangkat berdasarkan tujuan penelitian yakni semua berita yang merujuk pada kinerja kabinet dalam Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010. Dalam penelitian ini analisis isi didesain untuk mendapatkan sebuah perhitungan yang tepat, sehingga sangat baik bila digunakan dalam skala besar. Semakin besar unit analisis, semakin akurat data yang akan diperoleh.

b) Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data *intercoder* atau *coding sheet*

Data khas analisis isi ini berisikan pertanyaan yang dibuat berdasarkan unit analisis dan sub unit analisis dari variabel penelitian. Pertanyaan ini harus direspon oleh dua pengkoder dalam bentuk pilihan jawaban. Kategorisasi diturunkan dari unit analisis yang didapatkan dari 6 dimensi yang digunakan Dewan Pers dalam analisis *media performance* surat kabar pada tahun 2004 yakni kefaktualan, akurasi, kelengkapan isi berita, relevansi, keseimbangan berita, dan netralitas.

b. Dokumentasi

Data-data tertulis peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian ini yang berasal dari kliping surat kabar. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam pemilihan berita, yakni:

- teks berita dimuat Harian Seputar Indonesia dan Media Indonesia pada periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010, sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan dalam penelitian
- teks berita secara eksplisit menuliskan tema 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II dalam teks beritanya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kategorisasi tema berita.
- teks berita berada pada rubrik berita nasional dan tidak berada pada rubrik berita daerah. Hal ini digunakan mengingat tujuan penelitian ialah mengangkat analisis pemberitaan pada harian tingkat nasional.
- teks berita berupa berita *straightnews*. Yakni bentuk berita yang kerap ditemukan dalam pemberitaan, mengandalkan aktualitas dan nilai penting berita.

- untuk hasil yang sejajar, teks berita yang memuat foto tidak dipilih. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua teks berita menggunakan foto sebagai materi pendukung. Sedangkan untuk analisa gambar memerlukan metode penelitian yang lebih spesifik pula.

c. Studi pustaka

Peneliti mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, publikasi karya tulis ilmiah, skripsi dari sejumlah mahasiswa bidang jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta data *online* pada Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia.

c) Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menerangkan bagaimanakah performa kedua media (*media performance*) pada Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia dalam memberitakan 100 Hari Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat, sifat performa media yang ditemukan pada kedua media tersebut.

Penelitian ini juga bersifat komparatif, karena menggunakan dua buah media untuk diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Melalui hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan media manakah yang sekiranya memiliki *media performance* yang baik. Ketika kedua media memiliki kesamaan keterlibatan dalam koalisi kabinet, dapat diketahui di antara kedua media tersebut, media

manakah yang bersikap lebih memihak ataupun lebih independen dalam memberitakan.

Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis ini dapat memenuhi harapan, maka dipakai metode uji reliabilitas dengan rumus formula dari Ole R. Holsti, dengan menggunakan data nominal dalam bentuk presentase pada tingkat persamaan atas kategori yang digunakan, yaitu:

$$CR = \frac{2 M}{N1 + N2}$$

Dengan
CR = *Coefficient Reliability*
M = jumlah pernyataan yang disetujui kedua pengkoding (hakim) dan periset
N1, N2 = jumlah pernyataan yang dikode oleh kedua pengkoding (hakim) dan periset

Sumber: Kriyantono, 2006:235; Wimmer dan Dominick, 2003:157

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas.

$$Pi = \frac{(\% \text{ ObservedAgreement} - \% \text{ ExpectedAgreement})}{(1 - \% \text{ ExpectedAgreement})}$$

Dengan
Pi = nilai keterandalan
ObservedAgreement = persentase persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang disetujui pengkoder (yakni nilai *CR*)
ExpectedAgreement = persentase persetujuan yang diharapkan, yakni proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan

Sumber: Kriyantono, 2006:235

Proses uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini pertama-tama peneliti sebagai pengkoding pertama memilih dua pengkoding lain sebagai pembanding -Kriyantono mengistilahkannya sebagai "hakim" (Kriyantono,

2006:234). Antara peneliti dan pengkoding 1, serta peneliti dan pengkoding 2 melakukan pengkodingan untuk tiap-tiap unit analisis dan sub unit analisis pada sampel berita dalam Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia.

Dengan menggunakan rumus dari Holsti, yaitu *Coefficient Reliability (CR)* dapat diketahui pemenuhan derajat kesamaan antara peneliti dan pengkoding, serta antara kedua pengkoding. Setelah kedua penghitungan tersebut usai kemudian digunakan rumus Scott agar diperoleh nilai keterandalan rata-rata yang diperoleh dari kedua pengkoding untuk masing-masing unit analisis. Kriyantono menyampaikan ambang penerimaan yang seringkali dipakai untuk uji reliabilitas kategorisasi ialah 60% (Kriyantono, 2006:236). Ambang penerimaan yang sama digunakan pada riset Dewan Pers (Rahayu, ed. 2006:34).

Penelitian ini akan terbagi menjadi empat (4) bagian/bab. Bagian pertama merupakan bagian pendahuluan. Bagian ini berisikan pendahuluan, yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan peneliti sehingga tertarik melakukan riset ini. Pada bagian ini dijelaskan pula rumusan masalah serta tujuan diadakannya penelitian, yakni untuk mengetahui bagaimanakah *media performance* pemberitaan mengenai 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dalam Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia pada periode 20 Oktober 2009 hingga 30 Januari 2010. Bagian kedua diisi dengan deskripsi mengenai objek penelitian. Deskripsi tersebut akan meliputi kronologis pemberitaan pada kedua media serta konteks historis dan pertumbuhan Surat Kabar Harian Media Indonesia dan Seputar Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mengetahui secara umum dinamika kedua media.

Pada bagian ketiga akan dijabarkan data serta analisis data hasil penelitian. Sebanyak tiga puluh delapan berita dari Media Indonesia dan tiga puluh dua berita dari harian Seputar Indonesia akan dianalisa. Data tersebut akan meliputi tabulasi data perolehan *coding sheet*. Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dan oleh dua orang lain yang bertindak sebagai pengkoding atau *intercoder*.

Dalam analisis akan dijelaskan perolehan nilai korelasi pada tiap-tiap unit analisis *media performance* sebagaimana disampaikan sebelumnya. Data analisa akan disampaikan dalam bentuk grafik, disertai deskripsi kalimat atasnya. Sementara pada bagian keempat, akan disampaikan kesimpulan serta saran untuk penelitian mendatang.